

Newsletter Pusdatin



Volume 19 No. 1, Edisi Januari 2022

ISSN : 1411-9196



Kick Off Agriculture Working Group (AWG) G20 Presidensi Indonesia Tahun 2022

 Oleh Andry P

Bertempat di Ruang Agriculture War Room (AWR) Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada hari ini telah melaksanakan Kick Off Agriculture Working Group (AWG) G20 presidensi Indonesia tahun 2022. Pelaksanaan Kick Off ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI, Bapak Syahrul Yasin Limpo, turut dihadiri oleh Duta Besar Italia dan Duta Besar India untuk Indonesia selaku troika G20 serta segenap pejabat Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga lain, Lembaga/Universitas, Organisasi Internasional, Pemerintah Daerah, dan Swasta, baik secara fisik maupun virtual. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Italia selaku tuan

Daftar Isi

Kick Off Agriculture Working Group (AWG) G20 Presidensi Indonesia Tahun 2022

Halaman 1

Pemanfaatan Peta Digital Menggunakan Smartphone

Halaman 4

Dukungan Pusdatin dalam Rangka Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 7

Info Data Pertanian

Halaman 12

Scan QR Code



atau akses link
pusdatin.setjen.pertanian.go.id

rumah AWG 2021 menyampaikan sambutan melalui pesan video.

Pertemuan AWG G20 presidensi Indonesia tahun 2022 ini mengangkat tema “Balancing Production and Trade to Fulfill Food for All”, yaitu memastikan keseimbangan jaminan pasokan pangan nasional dari sumber produksi pertanian dalam negeri dan jaminan perdagangan pangan lintas batas negara untuk menjamin kecukupan pangan bagi semua orang. Pemilihan tema tersebut dilakukan dalam upaya untuk mendorong capaian target “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”/“Sustainable Development Goals” (SDGs), khususnya Tujuan 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

Sektor pertanian berperan penting dalam pemenuhan hak masyarakat atas pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Sektor pertanian juga berkontribusi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Namun, pandemi global COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, telah menciptakan tantangan baru terhadap ketahanan pangan dan gizi. Untuk mempercepat proses pemulihan dampak pandemi, AWG G20 akan fokus untuk mengintensifkan komitmen bersama pada tiga isu prioritas.

Isu prioritas yang pertama adalah membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Hal ini

Tim Redaksi

Penanggung jawab

Kapusdatin

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

Andry Polos, S.Kom
Aulia Azhar Abdurachman, S.Si
Dra. P. Hanny Mulianny, MM
Hani Hanifah R, S. Kom

Fotografer

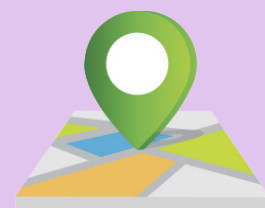
Iswadi
Sri Lestari, SE

Desain Grafis

Dhanang Susatyo, SE
Rizky Purnama R, S.Kom

Sekretariat

Eli David, S.Sos, MM
Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Cahyani Wartianingsih, S.Kom
Marwati
Hotlanis Mangatur S, S.Kom
Mudino
Priatna Sari
Didik Pratama Saputra, S.Kom



Alamat Redaksi

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
PERTANIAN

Jl. Harsono RM No.3 Gd D Lantai IV

Pasar Minggu - Jakarta 12550

Telp : 021- 7805305, 7816384

Fax : 021 - 7822638

e-mail : newsletter@pertanian.go.id



dilakukan diantaranya melalui upaya meningkatkan diversifikasi produksi dan konsumsi, mengurangi dan mengelola limbah pangan dan pertanian (food loss and waste), memastikan keterlibatan wanita dan pemuda pada rantai pasok dan nilai pertanian, mendukung UMKM sektor pertanian dan mempercepat implementasi sistem pertanian cerdas yang ramah iklim / climate-smart agriculture (CSA).

Isu prioritas yang kedua adalah mendorong terciptanya perdagangan pangan yang terbuka, transparan, dan dapat diprediksi untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi semua. Hal ini sangat penting untuk memastikan operasionalisasi rantai nilai pangan yang tangguh dan efektif, dan aliran pangan lintas batas negara yang lancar.

Isu prioritas yang ketiga adalah mendorong kewirausahaan pertanian yang inovatif melalui pertanian digital untuk perbaikan penghidupan para petani di wilayah pedesaan. Digital teknologi membuka peluang untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. G20 akan mendiskusikan dukungan dan kemitraan dalam membangun kapasitas digital terutama untuk petani kecil.

AWG G20 presidensi Indonesia tahun 2022 ini memiliki sejumlah rangkaian pertemuan, yaitu: Agriculture Market Information System (AMIS) yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 di Bogor; Agriculture Deputies Meeting (ADM) 1 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30-31 Maret 2022 di Bogor; Agriculture Deputies Meeting (ADM) 2 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27-29 Juli 2022 di Yogyakarta, dengan side event-nya berupa pameran dan field trip; Meeting of Agruculture Chief Scientist (MACS) yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6-8 Juli 2022 di Bali, dimana terdapat 2 (dua) side event pada MACS ini, yaitu: Technical Workshop 1, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Agustus 2022 di Bali, dan Technical Workshop 2, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus - 2 September 2022 di Bogor; dan diakhiri dengan pertemuan tingkat Menteri Pertanian, Agriculture Ministerial Meeting (AMM) yang rencananya akan dilaksanakan pada

tanggal 14-15 September 2022 di Bali, dengan side event-nya berupa pameran dan field trip; serta Global Forum yang rencananya akan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan AMM, yaitu pada tanggal 13 September 2022.

Melalui AWC G20 presidensi Indonesia tahun 2022 ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan pencapaian “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” / “Sustainable Development Goals” (SDGs) terutama dalam penanggulangan kelaparan, pengurangan kemiskinan dan penanganan krisis perubahan iklim pada waktu yang bersamaan.

Sebagai bagian dari komunitas internasional, G20 perlu terus mendukung peran penting pertanian dalam menyediakan pangan dan gizi bagi semua, serta memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan produksi pangan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, serta keandalan, kepastian dan keadilan perdagangan pangan dan pertanian lintas batas negara (balancing production and trade to fulfil food for all).

Untuk itu, komitmen dan upaya bersama dalam membangun sistem pangan berkelanjutan yang tahan terhadap guncangan di masa depan, sangat penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pencapaian agenda SDGs 2030. Bapak Menteri Pertanian menyatakan, “Kami berharap dapat membahas isu ini lebih mendalam pada Pertemuan AWC G20 presidensi Indonesia tahun 2022 ini. Kami, di sektor pertanian, berkomitmen penuh untuk terus bekerja sama dengan semua pihak demi mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat di dunia.”

Pemanfaatan Peta Digital Menggunakan Smartphone

 Oleh Aulia Azhar Abdurachman

Digitalisasi data dan informasi sudah menjadi suatu keniscayaan mulai dari proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Upaya ini untuk menghadirkan data yang lebih cepat, termasuk pula pengumpulan data sektor pertanian yang tidak hanya berupa data statistik tetapi perlu ditampilkan data spasialnya, sehingga data produksi tidak hanya diketahui berapa jumlahnya tetapi dapat diketahui

pula dimana lokasinya. Pentingnya menghadirkan data yang cepat, tepat dan akurat menuntut pula kesiapan dari petugas data yang mumpuni dan tidak gagap teknologi. Karenanya perlu upaya untuk meningkatkan kompetensi terkait digitalisasi bagi petugas data. Kompetensi pengelolaan data mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data berbasis digital tidak boleh lagi dianggap sesuatu yang sulit

dan menjadi alat bantu yang mudah untuk dipelajari dan diaplikasikan. Untuk itu Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menggagas kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Peta Digital dengan menggunakan smartphone yang lebih murah dan mudah dalam pengoperasiannya. Kegiatan ini ditujukan kepada para petugas pengumpul data seluruh Indonesia (penyuluh dan pengumpul data) yang menjadi ujung tombak dalam pengumpulan data di lapangan. Diharapkan data (statistik dan spasial) yang diperoleh dapat dihadirkan lebih cepat, tepat dan akurat sebagai dasar pengambil kebijakan pembangunan pertanian di semua sub sektor.

Sosialisasi ini dimulai dengan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc., antara lain ; (1) kegiatan sosialisasi pemanfaatan peta digital untuk meningkatkan kemampuan penyuluh dalam melakukan pengumpulan data berbasis digital, sosialisasi ini merupakan kegiatan strategis karena memberikan pengetahuan terkait peta digital yang saat ini sudah menjadi hal yang biasa dan tidak sulit untuk dipelajari, (2) digitalisasi merupakan suatu keniscayaan di era digital, jika tidak mengetahuinya maka kita akan jauh tertinggal khususnya dalam penyampaian data dan informasi, (3) pada sosialisasi ini dishare hal yang terkait dengan pengalaman dan ilmu dan mekanisme bagi peningkatan kapasitas penyuluh untuk membuat peta digital, (4) diharapkan setelah mengetahui dan mempunyai pengalaman tentang peta

digital, penyuluh dapat menerangkan secara langsung kepada petani maupun pelaku usaha terkait , (5) perencanaan yang terkait dengan program-program nasional, daerah maupun bidang dengan tidak hanya menampilkan angka namun juga dapat memberikan penjelasan dimana lokasi dari data tersebut, (6) dengan menggunakan peta digital penyuluh dapat menyampaikan informasi secara lebih cepat, tepat dan akurat untuk perencanaan, eksekusi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, fenomena kerusakan planet dan antisipasi perubahan iklim, adanya pergeseran musim, ketidakpastian iklim dan iklim ekstrim harus dipetakan kapan dan dimana lokasinya dengan memperhatikan substansi dari peta yang disampaikan, (7) perlu fokus dalam memetakan daerah-daerah produksi dalam rangka peningkatan produktivitas, peningkatan IP dan ekstensifikasi dengan alat bantu peta, (8) pelembagaan peta sangat diperlukan agar berbagai macam peta dari sumber kementerian lain yang ada dapat disatukan guna diperoleh data yang utuh dan valid khususnya peta lahan sawah, (9) diharapkan Pusdatin menjadi instansi yang dapat mengkoordinasi semua lembaga terkait peta, adanya permasalahan data kerangka sample area terkait luasan areal sawah yang tidak akurat menjadi peluang perlunya lahan sawah dipetakan, perlu pula peningkatan pemahaman bagi semua pengguna peta dalam memanfaatkan peta sehingga adanya peta dapat memberikan informasi penting bagi kegiatan mereka.

Sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari 3 narasumber yaitu Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kapusdatin), Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial, dan Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kapusdatin menyampaikan tentang Satu Data Indonesia tercantum dalam Pepres 39/2019 bahwa jenis data terdiri dari; data statistik, geospasial dan keuangan negara tingkat pusat. Kapusdatin juga menyampaikan bahwa data berkualitas memiliki ciri data yang up to date dan tepat waktu, lengkap dan akurat. Agar data lebih mudah dipahami penyajian data dapat dilakukan berbasis geospasial sehingga tidak hanya menampilkan angka tetapi juga diperoleh informasi lokasi dari data tersebut. Terkait kualitas data, perlunya verifikasi dan validasi dalam menggunakan data spasial dan perlunya digitalisasi, yaitu proses dimana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Aplikasi peta digital berbasis citra satelit yang sudah dikembangkan oleh Pusdatin yaitu SIMOTANDI (Sistem Informasi Fase Pertanaman Padi) dan SIPERDITAN (Sistem Informasi Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Sektor Pertanian).

Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial menyampaikan Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2011 Badan Informasi Geospasial (BIG) mempunyai wewenang untuk

memberikan informasi geospasial, dimana informasi geospasial terdiri dari informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Informasi geospasial dasar meliputi : jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Peta dasar mencakup antara lain: garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, penutup lahan . Informasi geospasial tematik (IGT) meliputi : IGT sektoral (K/L), IGT strategis nasional (Non Sektoral), IGT hasil integrasi. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial merupakan pengumpulan, pengolahan, Penyimpanan & Pengamanan Data Geospasial & Informasi Geospasial, Penyebarluasan. Tujuan Undang Undang Informasi Geospasial yaitu menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Undang Undang Informasi Geospasial mencakup penyusunan standar dan uji implementasi, penyusunan metadata dan struktur database/Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) untuk siap berbagi pakai, dan Program Kebijakan Satu Peta. Dalam Kebijakan Satu Peta ada Standar Informasi Geospasial Tematik yang bertujuan untuk menghindari duplikasi data, meningkatkan kualitas data , efisiensi penyajian data, mempermudah akses data, membangun kemitraan, dan meningkatkan ketersediaan data.

Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian ATR/BPN menyampaikan Lahan Baku Sawah (LBS) ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketahanan

& kedaulatan pangan, diperlukan data/informasi spasial luas lahan sawah secara nasional. Menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1997 LBS didefinisikan sebagai areal tanah pertanian yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus, ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman tebu, tembakau, dan/atau tanaman semusim lainnya. Sesuai amanat PP 25/2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah ditetapkan oleh Menteri Urusan Bidang Pertanahan (Menteri ATR/BPN). Perkembangan Luas Lahan Baku Sawah Hingga 2019 terdapat beberapa provinsi

yang mengalami selisih luas lahan dengan kondisi minus diatas 50 hektar. Beberapa provinsi tersebut antara lain: Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah.

Acara sosialisasi ini ditutup dengan penyampaian materi tentang penggunaan aplikasi collector for ArcGIS untuk membantu melakukan updating lahan baku sawah. Materi ini disampaikan oleh beberapa fungsional statistisi di Pusdatin dan merupakan salah satu contoh dari pemanfaatan peta digital di lingkup pertanian.

Dukungan Pusdatin dalam Rangka Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan

 Oleh Suyati

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku – Sulawesi Selatan menggunakan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) Tahun 2021 guna melaksanakan berbagai pelatihan bagi para penyuluh (aparatur) dan petani (non aparatur). Pelatihan dilaksanakan dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebagai antisipasi dampak dari pandemi Covid-19. Tema pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan masing-masing kabupaten.

Untuk mengetahui efektifitas dan tingkat penerapan dari berbagai jenis pelatihan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan oleh BBPP Batangkaluku di 5 Kabupaten - Provinsi Sulawesi Selatan,

pada tanggal 1-2 Desember 2021 telah dilakukan evaluasi pasca pelatihan. Evaluasi pasca pelatihan dilakukan terhadap purnawidya baik aparatur maupun non aparatur serta atasan langsungnya. Purnawidya aparatur adalah para Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dengan atasan langsung nya adalah Koordinator Penyuluh yang ada di bawah pengawasannya, sementara purnawidya non aparatur adalah para petani/kelompok tani dengan atasan langsungnya adalah Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yang ada di wilayah kerja petani/kelompok tani tersebut.

5 (lima) wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut yaitu Kabupaten Kabupaten Bone, Kabupaten

Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini dukungan Pusdatin dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan adalah mengolah data hasil Evaluasi yang dilakukan di 5 Kabupaten kemudian dianalisis kedalam bentuk analisis deskriptif dari penerapan pasca pelatihan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, selanjutnya hasil rekonsiliasi data evaluasi dijadikan bahan pada rapat evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Review Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan (PEN) di Provinsi Sulawesi Selatan, pelaksanaan rapat evaluasi diselenggarakan di Kota Pare-pare pada tanggal 17 Desember 2021.



Gambar 1. Bersama tim BBPP Batangkaluku BPPSDMP dan Pusdatin di BBPP Batangkaluku

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan Pemulihan Ekonomi Nasional di 5 lokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan tingkat penerapan masing-masing jenis pelatihan di masing-masing lokasi sebagai berikut:

1. Kabupaten Bone

Pelatihan PEN tahun 2021 di Kabupaten Bone dilaksanakan di lima belas lokasi titik lokasi pelatihan, terbagi 8 lokasi untuk pelatihan aparatur dan 7 lokasi untuk pelatihan non aparatur. Pelaksanaan pelatihan selama tiga hari antara tanggal 14 sampai dengan 26 Juni 2021, dengan jumlah peserta masing-masing jenis pelatihan 30 orang, total 450 orang peserta pelatihan.

Dari lima belas evaluasi pasca pelatihan, ada 1 materi pelatihan non aparatur dengan tingkat penerapan “cukup” dengan nilai tingkat penerapan rata-rata 52,78% terhadap 12 sampel petani yaitu Pelatihan Teknis Tematik Benih Bermutu Tanaman Kelapa Bagi Non Aparatur. Penerapan yang masih rendah pada materi “Menggunakan Benih Kelapa Bermutu dan Bersertifikasi” dengan alasan petani kurang menguasai materi.

2. Kabupaten Luwu

Pelatihan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Luwu meliputi 7 (tujuh) jenis pelatihan bagi para penyuluh pertanian lapangan (aparatur) dan 10 (sepuluh) jenis pelatihan bagi para petani (non aparatur) dengan total jumlah peserta 510 orang. Jenis pelatihan meliputi pelatihan manajerial dan pelatihan teknis.

Berdasarkan evaluasi pasca pelatihan Aparatur, ada 3 pelatihan dengan tingkat penerapan “cukup” yaitu : (1) Pelatihan Teknis Tematik Benih Berlabel Tanaman Padi bagi Aparatur Angkatan I dengan nilai tingkat penerapan 56%

terhadap 9 responden yang terpilih sebagai sampel. Penerapan yang masih rendah oleh Purnawidya adalah materi “Pengujian Laboratorium” dengan alasan yang dominan adalah “Peralatan kerja yang tidak memadai”. (2) Pelatihan Teknis Tematik Penanganan Pasca Panen Tanaman Kakao bagi Aparatur Angkatan I dengan nilai tingkat penerapan 49% terhadap 11 responden yang terpilih sebagai sampel. Penerapan yang masih rendah oleh Purnawidya adalah materi “Fermentasi” dengan alasan yang dominan adalah Keadaan lapangan belum memungkinkan untuk melakukan fermentasi masih focus pada pengendalian hama penggerek buah kakao, Keadaan lapangan belum ada penyimpanan dan pengemasan, umumnya kakao dijual dalam keadaan dikeringkan sehari saja dan Tidak ada lagi petani melakukan penyimpanan buah kakao.

(3) Pelatihan Teknis Tematik Pengendalian Hama dan Penyakit Bawang Merah bagi Aparatur Angkatan II dengan nilai tingkat penerapan 60% terhadap 12 responden yang terpilih sebagai sampel. Penerapan yang masih rendah oleh Purnawidya adalah materi “Lahan Pertanaman dari Serangan OPT dan Pembuatan Agens Hayati dalam Pengendalian OPT” dengan alasan yang dominan adalah kurang keterampilan dan peralatan kerja yang tidak memadai.

Berdasarkan evaluasi pasca pelatihan berdasarkan Non Aparatur, ada 2 pelatihan dengan tingkat penerapan “rendah” yaitu: (1) Pelatihan Teknis Tematik Pengendalian

Hama dan Penyakit Tanaman Kakao. Nilai tingkat penerapan 22% terhadap 11 responden yang terpilih sebagai sampel. Penerapan yang masih rendah oleh Purnawidya adalah materi “Mengamati Jenis dan Populasi Musuh Alami” dengan alasan yang dominan adalah “kurangnya keterampilan” (2) Pelatihan Teknis Tematik Budidaya Tanaman Jahe Merah. Nilai tingkat penerapan 26,67% terhadap 11 responden yang terpilih sebagai sampel. Penerapan yang masih rendah oleh Purnawidya adalah materi “Pengendalian OPT Jahe Merah, Mengidentifikasi OPT dan Usaha Tani Sesuai Prosedur” dengan alasan yang dominan adalah “kurang menguasai materi dan peralatan kerja yang tidak memadai”



Gambar 2. Evaluasi Pelatihan Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional di BPP Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan

3. Kabupaten Pinrang

Pelatihan PEN tahun 2021 di Kabupaten Pinrang dilaksanakan di delapan titik lokasi pelatihan yakni: BPP Mattiro Bulu, BPP Duampauna, Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, BPP Sawitto, BPP Duampauna, BPP Patampauna, BPP Larisang, dan BPP Mattiro Sompe. Pelaksanaan pelatihan selama tiga hari antara tanggal 14 sampai dengan 26 Juni 2021, dengan jumlah

peserta masing-masing jenis pelatihan 30 orang, total peserta 240 orang.

Berdasarkan evaluasi pasca pelatihan Aparatur, ada 4 pelatihan dengan tingkat penerapan “Sangat Baik” dan “Baik”. Dua pelatihan dengan tingkat penerapan “Sangat Baik” yaitu : (1) Pelatihan Teknis Tematik Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Cabai Angkatan II dan (2) Pelatihan Teknis Tematik Pengolahan Pasca Panen Tanaman Cabai Angkatan I dengan nilai tingkat penerapan 83,33% dan 100% terhadap 8 dan 11 responden. Sedangkan dua pelatihan dengan tingkat penerapan “Baik” yaitu : (1) Pelatihan Manajerial Kostratani Angkatan II dan (2) Pelatihan Teknis Tematik Pengendalian Hama dan Penyakit Penggerek Batang Tanaman Padi Angkatan IV dengan nilai tingkat penerapan 76,53% – 80,00% terhadap 12-14 responden.

Berdasarkan evaluasi pasca pelatihan berdasarkan Non Aparatur, ada 4 pelatihan dengan tingkat penerapan “Sangat Baik” dan “Baik”. Tiga pelatihan dengan tingkat penerapan “Sangat Baik” yaitu : (1) Pelatihan Teknis Tematik Teknologi Pemanfaatan TR4 Angkatan I, (2) Pelatihan Teknis Tematik Pembuatan Kompos Tanaman Padi Angkatan I dan (3) Pelatihan Teknis Tematik Pengelolaan Air Tanaman Padi Angkatan I dengan nilai tingkat penerapan 83,33%, 89,29% dan 95,83% terhadap 10, 7 dan 8 responden yang terpilih.

4. Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)

Kabupaten Sidrap mendapat alokasi 2

(dua) jenis pelatihan bagi para penyuluh pertanian lapangan (aparatur) dan 5 (lima) jenis pelatihan bagi para petani (non aparatur), dengan total peserta sebanyak 300 orang.

Berdasarkan evaluasi pasca pelatihan Non Aparatur oleh Purnawidya, ada satu pelatihan dengan tingkat penerapan “Rendah” yaitu : Pelatihan Teknis Tematik Budidaya Padi Organik dengan nilai penerapan 24,00% terhadap 5 responden terpilih. Penerapan yang masih rendah oleh Purnawidya yaitu Konversi lahan dan pengelolaan kesuburan tanah, Melakukan pemupukan dengan pupuk organik, Melakukan pengendalian OPT dengan pestisida organik, Melakukan pembuatan pupuk organik padat, Melakukan pembuatan pupuk organik cair. Alasan yang lebih spesifik karena kurang menguasai materi.



Gambar 3. Evaluasi Pasca Pelatihan Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional di Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan

5. Kabupaten Gowa

Pelatihan PEN tahun 2021 di Kabupaten Gowa dilaksanakan di delapan titik lokasi pelatihan yakni: BPP Barenbeng, BPP Kanreapia, Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, BPP Umbung dan BPP Malakaji. Pelaksanaan pelatihan selama tiga hari antara tanggal 14 sampai dengan 26 Juni

2021, dengan jumlah peserta masing-masing jenis pelatihan 30 orang, total peserta 240 orang.

Berdasarkan evaluasi pasca pelatihan berdasarkan Aparatur dan Non Aparatur oleh Purnawidya, ada tiga pelatihan dengan tingkat penerapan “Sangat Rendah”. Satu pelatihan berdasarkan Aparatur yaitu : Pelatihan Teknis Tematik OPT Kentang bagi Aparatur Angkatan I dengan nilai penerapan 1,67%. Penerapan yang masih rendah oleh purnawidya adalah Penyuluhan dan Pendampingan kepada Kelompok Tani di wilayah kerja purnawidya tentang cara mengamati lahan pertanian dari serangan OPT. Alasan yang dominan karena tidak ada pertanian kentang di wilayah kerja.

Sedangkan evaluasi pasca pelatihan berdasarkan Non Aparatur oleh Purnawidya, ada dua pelatihan dengan tingkat penerapan “Sangat Rendah” yaitu : (1) Pelatihan Teknis Tematik Pemupukan Berimbang Jagung Angkatan II dengan nilai penerapan 16,7% terhadap 12 responden. Penerapan yang masih rendah oleh purnawidya adalah penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani tentang prinsip pemupukan berimbang. Alasan yang dominan peralatan kerja tidak memadai, kemudian (2) Pelatihan Teknis Tematik Analisis Kebutuhan Hara Angkatan I dengan nilai penerapan 10% terhadap 18 responden. Penerapan yang masih rendah oleh purnawidya adalah menggunakan PUTS sebelum penanaman atau pemupukan. Alasan yang dominan karena peralatan kerja yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 5 lokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan tingkat penerapan masing-masing jenis pelatihan di masing-masing lokasi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan lanjutan kepada purnawidya untuk jenis pelatihan yang belum bisa diterapkan oleh purnawidya dengan alasan masih kurang menguasai materi pelatihan.
2. Melakukan kajian yang lebih mendalam untuk menentukan jenis pelatihan yang tepat di masa datang yang disesuaikan kebutuhan dan kondisi petani di masing-masing wilayah sehingga tingkat penenapannya menjadi lebih tinggi.
3. Perlunya Waktu Pembelajaran untuk Praktek Lapang yang lebih lama.
4. Pemateri yang lebih jelas lagi menerangkan.
5. Pelatihan yang diadakan minimal setahun 2 kali.
6. Memberikan Buku Pedoman Teknis baik softcopy atau hardcopy kepada purnawidya agar bisa di pelajari kembali setelah pelatihan berakhir.
7. Memilih lokasi pelatihan yang sesuai dengan lokasi pertanian

Info Data Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP)

- NTP nasional Desember 2021 sebesar 108,34 atau naik 1,08 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,72 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,63 persen.
- Secara nasional, NTP Januari–Desember 2021 sebesar 104,64 dengan nilai It sebesar 112,94 sedangkan Ib sebesar 107,93.
- Pada Desember 2021, NTP Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan tertinggi (2,59 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan terbesar (0,70 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.
- Pada Desember 2021, terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,83 persen yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada seluruh kelompok pengeluaran.
- Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Desember 2021 sebesar 108,52 atau naik 1,40 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Inflasi

- Pada Desember 2021, terjadi inflasi sebesar 0,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,66. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,91 persen dengan IHK sebesar 105,87 dan terendah terjadi di Pekanbaru sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 106,53. Sementara deflasi

tertinggi terjadi di Dumai sebesar 0,13 persen dengan IHK sebesar 107,70 dan terendah terjadi di Bukittinggi sebesar 0,04 persen dengan IHK sebesar 106,59.

- Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,61 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,16 persen; kelompok transportasi sebesar 0,62 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,24 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen. Sementara kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan.
- Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,87 persen.
- Komponen inti pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,16 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Desember) 2021 dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) adalah sebesar 1,56 persen.

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)